

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Masalah penelitian	Hasil
1	(Rahmawati, 2010)	Analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kutai timur	Bagaimana kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kutai timur	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kab Kutai Timur mengalami peningkatan dengan berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Kutai Timur sebesar 8.12%
2	Dimas (2016)	Pengelolaan desa wisata dalam <i>Community Based Tourism</i> (CBT) perpektif studi kasus pada desa wisata Gubungklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.	Bagaimana penerapan <i>Community Based Tourism</i> (CBT) di desa wisata Gubungklakah dan bagaimana tingkat partisipan masyarakat dalam pengelola desa wisata	Keikutsertaan anggota komunitas ke dalam setiap kegiatan pariwisata, pelestarian lingkungan hidup pelestarian budaya dan pemerataan pendapatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata
3	(Pia, 2014)	Kondisi pariwisata berkelanjutan bidang sosial budaya berdasarkan pengalaman dan harapan pengunjung di Pantai Tanjung Papuma Jember	Bagaimana harapan dan pengalaman dari pengunjung supaya mendapatkan sebagai acuan peningkatan pengelolaan wisata di Pantai Papuma	Peningkatan pengelolaan wisat harus memperhatikan aksesibilitas berupa kondisi jalan masuk wisata, dan petunjuk arah ke wisata. Atraksi, amenitas, tata ruang obyek wisata.
4	(Arifin, 2017)	Pendekatan <i>Community Based Tourism</i> (CBT) dalam Pembina hubungan komunitas	Bagaimana kegiatan <i>Community Based Tourism</i> (CBT) sebagai saah satu aktivitas eksternal <i>public relation</i>	Pengelola dengan komunitas melalui komunikasih dengan cara rapat koordinasi untuk memberikan sebuah informasi dan pengelolaan selalu mengikutsertakan komunitas untuk aktif

		dikawasan Kota Tua Jakarta		mengikuti program-program yang telah dibuat oleh unit pengelolaan.
5	(Rizkianto, et al., 2018)	Penerapan konsep konsep <i>Community Based Tourism</i> (CBT) dalam pengelolaan daya Tarik wisata berkelanjutan (studi pada desa wisata bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek)	Bagaimana konsep <i>Community Based Tourism</i> (CBT) dalam pengelolaan daya Tarik desa wisata berkelanjutan	Pada penerapan konsep <i>Community Based Tourism</i> (CBT) dalam mengelola daya Tarik wisata berkelanjutan. Terhadap berbagai hal yakni partisipasi masyarakat lokal, pembentukan kelembagaan desa wisata, pengelolaan daya Tarik wisata berwawasan lingkungan, terciptanya kegiatan usaha masyarakat. Selain itu juga terhadap peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan daya Tarik wisata berkelanjutan yakni masyarakat sebagai pelaku peran pemerintah sebagai fasilitator, dan peran swasta sebagai pengembang atau investor.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.2.1.1 Pengertian

Akuntansi sektor Publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklarifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. (ULM, 2017)

2.2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

1. *Management control*, tujuannya untuk memberikan informasi yang di butuhkan untuk mengelola sesuatu organisasi dengan sumber daya yang dipercayakan atau diangarkan untuk sebuah organisasi.
2. *Accountability*, tujuan ini hampir sama dengan management control yaitu memberikan informasi yang berguna untuk manager sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sumber daya atau bidang atau divisi yang berada dibawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah dana atau anggaran publik. (ULM, 2017)

2.2.1.3 Sifat dan karakteristik

Akuntansi sektor publik jelas berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan yang mencolok adalah bagian instansi yang menggunakannya. Sektor publik biasanya terkait dengan organisasi pemerintah daerah, secara umum berikut ini komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik. (ULM, 2017)

1. Ekonomi
 - a) Tingkat inflasi
 - b) Pertumbuhan sektor ekonomi
 - c) Tenaga kerja produktif
 - d) Nilai kurs atau nilai mata uang
 - e) Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapital
2. Politik
 - a) Hubungan antar negara dengan masyarakatnya

- b) Legitimasi hukum pemerintah
- c) Tipe pemerintah yang berkuasa
- d) Idiologi dan dasar yang dianut
- e) Jaringan internasional
- f) Hubungan antar lembaga

3. Kultular

- a) Keragaman ras, suku, agama, budaya, dan bahasa
- b) Sistem nilai yang berlaku di masyarakat
- c) Sejarah
- d) Kondisi sosiologis masyarakat
- e) Tingkat pendidikan
- f) Karakter masyarakat yang berbeda tiap daerah

2.2.2 Akuntansi Desa

2.2.2.1 Pengertian Akuntansi Desa

Akuntansi keuangan desa adalah suatu kegiatan dari pencatatan sampai pelaporan data keuangan di dalam pemerintah desa sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Dilihat dari fungsinya, bahwa akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (yaitu pemerintah desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. (Jago Akuntansi, 2016)

Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (yaitu kepala desa) yang dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Lalu siapa saja pihak internal dan eksternal itu? Pihak internal adalah pihak yang berada di struktur

organisasi desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala urusan atau kepala seksi. Pihak eksternal meliputi, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pemerintah, baik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, serta pihak lainnya seperti RT/RW, dll. Dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah desa harus mematuhi prinsip-prinsip akuntansi; (Jago Akuntansi, 2016)

1. Prinsip harga perolehan yaitu, prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harga (asset), kewajiban atau utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan itu bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan atau dibayarkan dari kas.
2. Prinsip realisasi pendapatan. Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang di peroleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (asset) dan berkurangnya hutang atau bertambahnya jumlah kas, pencatatan pendapatan pada pemerintah desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.
3. Prinsip obyektif yaitu prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi, prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak internal untuk menghindari

terjadinya kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

4. Prinsip pengungkapan penuh, dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi keputusan.
5. Prinsip konsistensi, dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya,

Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerentahan desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

2.2.3 Desa Wisata

Desa wisata adalah komunitas atas masyarakat yang terdiri dari penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian, serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan masing masing, memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangannya kepariwisataan diwilayahnya. (Gianyar Tourism, 2015)

Desa wisata menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan, kemudian memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam aktivitas sosialnya, kelompok swadaya dan

swakarsa masyarakat berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan; mewadai peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayah; meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pelaku utama, komunitas atau masyarakat berupaya meningkatkan potensi pariwisata atau daya tarik wisata yang ada di wilayahnya, selanjutnya, komunitas atau masyarakat menyiapkan diri sebagai tuan rumah yang baik bagi para wisatawan ketika berkunjung, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komunitas atau masyarakat di desa wisata, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan asset dan potensi yang dimiliki.

2.2.3.1 Objek Wisata

Berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 1 ayat 5, objek wisata atau disebut daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Menurut Suryo Sakti (2012) objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan yang dapat menarik wisatawan atau pengajuan untuk datang kesuatu tempat tertentu, dari penjelasan

diatas objek wisata adalah bentuk fasilitas yang dapat dinikmati oleh wisatawan sehingga para wisatawan tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut.

2.2.3.2 Jenis obyek wisata

Sesuai dengan kondisi geografis disetiap daerahnya, maka potensi yang dapat disajikan sebagai objek wisata untuk menarik para wisatawan lokal maupun internasional. Obyek dan daya Tarik wisata dapat dibedakan menjadi 3 yaitu.

1. Obyek wisata alam adalah sumber daya yang potensi serta memiliki daya Tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alamia maupun dan usaha budi daya.
2. Obyek wisata sosial dan budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek dan daya tarik meliputi museum, peninggalan sejarah, situs arkeologi, upacara adat, kerajinan dan seni pertunjukan.
3. Obyek wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di Indonesia. Wisata ini lebih diutamakan pada wisatawan yang mempunyai motivasi khusus.

2.2.4 *Community-based tourism (CBT)*

Community Based Tourism (CBT) yaitu konsep penegmbangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengeloan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Ada 3 kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yaitu penjelajahan (*adventure travel*), wisata budaya (*cultural Tourism*), dan ekowisata (*ecotourism*),

Menurut (Brain, 2001) menyatakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan dan menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratis serta distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung dipedesaan. Menurut (Endah, 2007) definisi CBT yaitu :

1. Bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata.
2. Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapatkan keuntungan dari obyek wisata tersebut.
3. Pemberdayaan secara politis dan demokratis serta distribusi keuntungan kepada kelompok yang kurang beruntung di pedesaan.

Menurut (Endah, 2007) definisi CBT yaitu bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapatkan keuntungan dari obyek wisata tersebut, dan menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratis serta distribusi keuntungan pada kelompok yang kurang beruntung di pedesaan. Ciri-ciri khusus dari CBT menurut yakni menekankan strategi yang pada identifikasi tujuan masyarakat serta keinginan dan kemampuan mereka dalam menerima manfaat pariwisata sehingga setiap masyarakat harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan perencanaan sedemikian rupa sehingga

aspek sosial dan lingkungan masuk dalam perencanaan dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan dan juga masyarakat setempat. Timothy (1999:373) mengungkapkan ciri-ciri khusus CBT berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain memiliki ketertarikan atau minat, yang memberi kontrol lebih besar dalam proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Berdasarkan pengertian di atas konsep *Community-Based Tourism* adalah konsep yang menjadikan masyarakat adalah elemen terpenting dalam pengembangan pariwisata dimana partisipasi pada setiap masyarakat bahkan kelompok bekerjasama dengan *stakeholder* dapat menjadikan pariwisata yang di daerahnya menjadi pariwisata yang berbasis berkelanjutan

2.2.4.1 Pengukuran *Community-Based Tourism* (CBT)

Suansari (2003:21-22) mengungkapkan beberapa point-point aspek utama pengembangan CBT terdapat dimensi, yaitu:

1. Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.
2. Dimensi sosial dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.

3. Dimensi budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal.
4. Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi.

2.2.5 *Sustainable Tourism* (Wisata Berkelanjutan)

Konsep pembangunan wisata berkelanjutan (Haryanto, 2014) Definisi pembangunan wisata berkelanjutan dapat memiliki makna beragam. Orang banyak bidang yang berbeda menggunakan istilah berbeda didalam kontek yang berbeda dan mereka mempunyai konsep, bias, dan pendekatan berbeda pula. Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam piagam pariwisata berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk pengembangan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya secara berkelanjutan.

Konsep pembangunan wisata berkelanjutan merupakan konsep yang ideal dalam negara negara berkembang. Konsep ini digunakan untuk menghadapi tantangan kedepan dalam era globalisasi dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.pembangunan wisata berkelanjutan harus

didukung dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat.

Pengembangan Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism jika sudah memenuhi empat aspek pariwisata berkelanjutan dan sudah terdapat peran komunitas dan pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT), maka sustainable tourism itu sudah terjamin.

2.2.6 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin atau pembangunan. Pendapatan Asli Desa berasal dari

1. Penerimaan tanah kas desa,
2. Pasar atau kios desa,
3. Pemandian umum yang diurus desa,
4. Daya tarik wisata,
5. Bangunan milik desa yang disewakan,

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

1. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
2. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, meliputi hibah pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat, luar negeri, swasta, dan hibah lainnya. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa,

pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. (Badan Pusat Statistik, 2020)

2.3 Kerangka Konseptual

Pariwisata merupakan salah satu sektor dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pariwisata merupakan produk, aktivitas, serta pelayanan dari hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Dalam suatu pariwisata terdapat pelaku pariwisata dalam mengembangkan objek wisata salah satunya adalah masyarakat setempat objek wisata itu sendiri. Pada penelitian ini menggunakan konsep *Community-Based Tourism (CBT)* sebagai konsep pengukuran pengembangan *Sustainable Tourism*. Swartbooke (2010:16) menyatakan bahwa pada hakekatnya pariwisata berkelanjutan harus terintegrasi pada empat aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dari aspek yang mempengaruhi menuju pariwisata yang berkelanjutan tersebut akan diteliti sehingga dapat diketahui bagaimana suatu pariwisata menjadi pariwisata menggunakan konsep *Community-Based Tourism (CBT)*. Berikut kerangka penelitiannya:

